

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berbagai upaya peningkatan mutu bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan, namun selalu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan selalu dibahas dan dibincangkan, yaitu: Pertama, isu pendidikan, yang *concern* terhadap prestasi/hasil sekolah yang diselenggarakan pemerintah. Kedua, isu politik yang *concern* terhadap persoalan distribusi keuangan dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan *vis-a-vis* prioritas kepentingan publik lainnya. Ketiga, alasan ekonomi yang *concern* terhadap hubungan antara pengeluaran uang untuk pendidikan dengan keberhasilan ekonomi, khususnya dikaitkan dengan bangsa-bangsa kompetitor (Preedy, 1997: 2).

Dalam konteks mutu pendidikan ini, terdapat beberapa syarat agar sebuah pendidikan dapat berjalan secara efektif, di antaranya adalah terpenuhinya sumber daya manusia, finansial, dan material pendidikan (Preedy, 1997: 4). Ketiga jenis sumber daya tersebut merupakan *input* pendidikan yang akan berdampak pada proses transformasi pendidikan, yang terdiri dari sistem struktural, sistem politik, sistem individu, dan sistem kultural yang berhubungan satu sama lainnya mempengaruhi mutu proses

pembelajaran dan pengajaran. Proses transformasi tersebut selanjutnya akan berdampak pada mutu *output* pendidikan (Hoy, 2008: 292)

Selain masalah mutu di atas, terdapat persoalan lain yang selalu dibicarakan dalam dunia pendidikan, yaitu masalah kesamaan memperoleh pendidikan (*equality*). Jika mutu (*quality*) berbicara tentang level dan standar, maka *equality* berbicara tentang kekuasaan dan sumber daya. Dalam pendidikan, kedua konsep tersebut harus bersama. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap anak yang berumur 7 sampai 15 tahun harus menyelesaikan pendidikan dasar.

Undang-Undang tersebut berimplikasi pada kewajiban pemerintah untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Untuk itu pemerintah menargetkan 100% angka partisipasi sekolah (APS) di tingkat SD dan 96% di SMP pada tahun 2009. Kemudian hal ini dituangkan dalam program Pendidikan untuk Semua (PUS) atau sering disebut sebagai *Education for All (EFA)*. Program Pendidikan untuk Semua (PUS) ditujukan untuk: 1) Seluruh siswa dapat ditampung sampai tingkat pendidikan sekolah menengah pertama. 2) Menjamin bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki akses yang sama dan penuh terhadap sekolah yang menyediakan lingkungan belajar yang menarik dan pengajaran yang efektif. 3) Menyediakan pendidikan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia.

Walaupun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah, yaitu yang menyangkut pemerataan mutu dan pemerataan akses pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pertama, tantangan yang berhubungan dengan pemerataan mutu pendidikan, yang di antaranya dapat dilihat dan kadang-kadang ditentukan oleh sejumlah aspek kelengkapan infrastruktur pendukung proses pendidikan, misalnya kondisi ruang kelas, tingkat pendidikan guru, rasio guru-siswa.

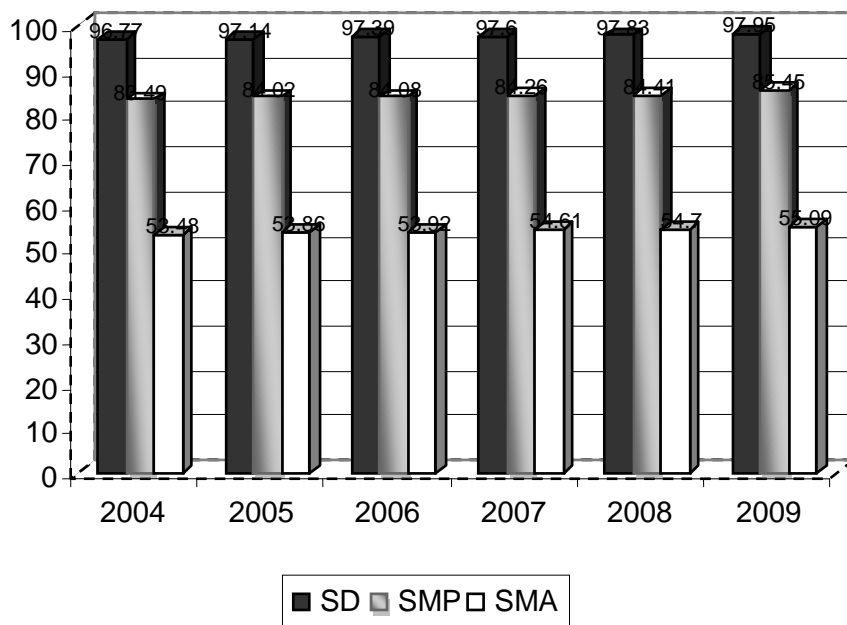
Dari segi kondisi umum fisik gedung dan ruang kelas, khususnya SD, diperoleh data bahwa dalam periode 2003-2007, jumlah SD meningkat rata-rata 315,33 buah. Bersamaan itu, jumlah ruang kelas juga meningkat, rata-rata 11.605,66. Kondisi ruang kelas ini bervariasi antara 'baik', 'rusak ringan' dan 'rusak berat' (Jurnal DIALOG, Edisi 3/November/Tahun II/2008). Sementara itu, dari segi tingkat pendidikan guru pada jenjang SD, terlihat bahwa komposisi guru yang belum sarjana sangat besar. Data tahun 2004-2005 menunjukkan bahwa hanya terdapat 8,94% atau 201.863 guru yang berpendidikan S-1 dan 0,12% atau 1.543 guru SD yang berpendidikan pascasarjana. Sementara itu, dari segi rasio guru-siswa SD, diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2003-2004 rasio sekolah-siswa 1:178, pada tahun 2006-2007 terdapat penurunan rasio menjadi 1:178,99. Sementara itu, pada tahun 2003-2004 rasio guru-siswa 1:20,67, pada tahun 2006-2007 mengalami peningkatan rasio menjadi 1:18,96 (Jurnal DIALOG, Edisi 3/November/Tahun II/2008).

Tabel 1.1. Rasio Sekolah-Siswa dan Guru-Siswa Tahun 2003-2007

Rasio	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Sekolah-Siswa	1 : 178	1 : 175,9	1 : 175,24	1 : 178,99
Guru-Siswa	1 : 20,67	1 : 19,47	1 : 19,29	1 : 18,96

Sumber: Diringkas dari Jurnal DIALOG, Edisi 3/November/Tahun II/2008

Kedua, tantangan yang berhubungan dengan pemerataan akses pendidikan, yang salah satu di antaranya dapat dilihat melalui kesenjangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antara tingkat SD, SMP, dan SMA.

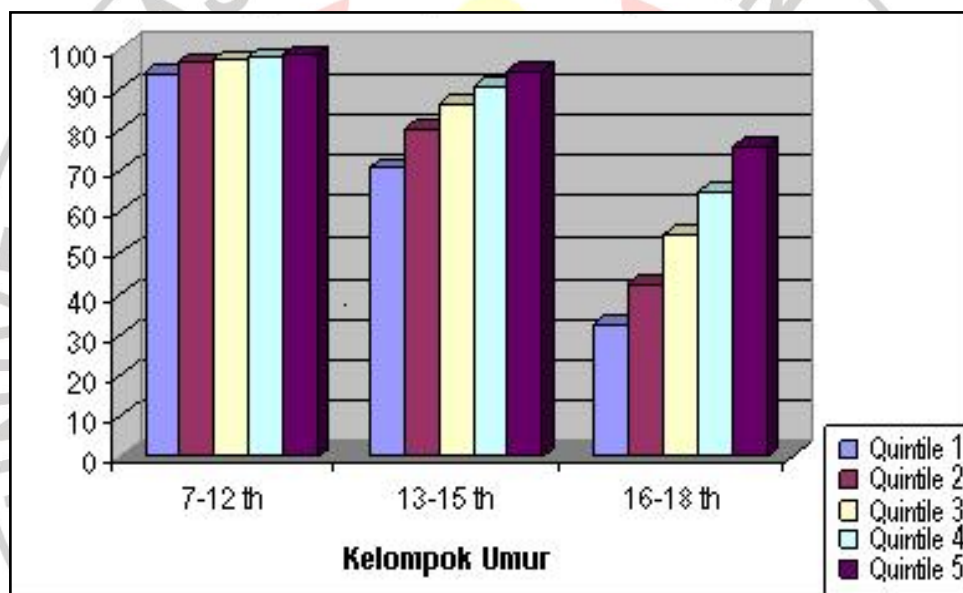


Gambar 1.1. Angka Partisipasi Sekolah pada Berbagai Jenjang Pendidikan, 2004-2009

Sumber: Badan Pusat Statistik 2009

Semakin tinggi jenjang pendidikan justru akan semakin rendah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Gambar 1.1. menunjukkan bahwa APS untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu pada anak usia 7-12 tahun selalu

mencapai nilai di atas 90%. Akan tetapi tidak demikian untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu anak usia 13-15. Pada jenjang pendidikan SMP ini, APS hanya menunjukkan kisaran 80-an% pada tahun 2004-2009. Kemudian pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), APS semakin mengalami penurunan. Nilai APS pada jenjang pendidikan SMA ini hanya mencapai nilai sebesar 50-an% tahun 2004-2009.



Catatan: Q1= Quintile termiskin dan Q5 = Quintile terkaya

Gambar 1.2. Partisipasi Sekolah Menurut Golongan Pendapatan 2004

Sumber: http://kfm.depsos.go.id/mod.php?mod=userpage&page_id=6

Salah satu faktor penyebab rendahnya APS tersebut adalah faktor sosial ekonomi. Sebagaimana dijelaskan dalam gambar di atas, bahwa semakin rendah tingkat sosial ekonomi seseorang ditinjau dari segi pendapatannya, semakin rendah pulalah partisipasinya dalam sekolah.

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa masalah pemerataan mutu dan pemerataan akses pendidikan merupakan dua tantangan yang menjadi prioritas pembangunan pendidikan nasional. Dalam konteks itulah, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerataan mutu dan akses pendidikan, yang salah satu kebijakannya terkait dengan anggaran pendidikan, pemerintah menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari total anggaran nasional. Anggaran tersebut selain digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, juga untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah masyarakat. Pemerintah untuk mensukseskan program pemerataan mutu dan pemerataan akses tersebut, memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) kepada sekolah/madrasah. Walaupun demikian, bantuan pemerintah tersebut tidak dapat mencukupi semua kebutuhan operasional sekolah.

Menurut perhitungan *Decentralized Basic Education* (DBE) USAID, kebutuhan operasional siswa SD per bulan Rp 1.109.000 dan SMP Rp 1.595.000. Tahun 2009 BOS per tahun naik 50%. SD jadi Rp 397.000 di kabupaten dan Rp 400.000 di kota. SMP dan sederajat jadi Rp 570.000 di kabupaten dan Rp 575.000 di kota. Berdasar perhitungan mereka, BOS cuma bisa memenuhi kebutuhan operasional sekolah sekitar 36%.

Dari segi jumlah Sekolah/Madrasah, menurut laporan Kementerian Pendidikan Nasional, hingga tahun 2010 ini, terdapat 180.577 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtida'iyah di Indonesia (143.668 Sekolah/Madrasah Negeri dan 36.909 Sekolah/Madrasah Swasta). Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, terdapat 49.347

Sekolah/Madrasah (23.389 Sekolah/Madrasah Negeri dan 25.958 Sekolah/Madrasah Swasta). Sementara pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah, terdapat 19.295 Sekolah/Madrasah (6.830 Sekolah/Madrasah Negeri dan 12.465 Sekolah/Madrasah Swasta) (<http://npsn.jardiknas.org/index.php>. Diakses tanggal 29 April 2010)

Terbatasnya anggaran pendidikan nasional, meski telah dinaikkan menjadi 20% dari total anggaran nasional, dan besarnya jumlah sekolah/madrasah di tanah air sebagaimana disebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah sampai saat ini belum mampu sepenuhnya mengatasi problem pendidikan nasional, terutama terkait soal anggaran. Dalam konteks inilah, pemerintah berharap partisipasi masyarakat, terutama Sekolah/Madrasah Swasta untuk turut secara proaktif mencerdaskan bangsa.

Untuk mengatur pemerataan mutu dan pemerataan akses pendidikan, baik di Negeri maupun Swasta, selanjutnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan pendidikan. Misalnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa terdapat 8 standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Salah satu di antaranya adalah standar pembiayaan pendidikan. Dalam pasal 62 dinyatakan, bahwa pembiayaan pendidikan mencakup biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

Terkait dengan pendanaan, peraturan di atas selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan lebih detail lagi tentang biaya

pendidikan berikut sumber-sumber dana pendidikan. Terkait dengan sumber dana ini, PP 48 2008 menyatakan bahwa untuk membiayai pendidikan, dana dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing yang tidak mengikat atau sumber dana lain yang sah.

Pihak yang paling mendapatkan tantangan pendanaan adalah Sekolah/Madrasah Swasta. Dibanding Negeri, Sekolah/Madrasah Swasta dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menggalang dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang bermutu. Bagi sekolah/madrasah Negeri pembiayaan dan pendanaan pendidikan hampir tidak menjadi masalah, karena sebagian besar sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Sementara sumber dana dari masyarakat hanya sebagian kecil saja. Namun bagi Sekolah/Madrasah Swasta ini tentu menjadi masalah tersendiri. Berbeda dari negeri, sumber sekolah/madrasah swasta justru sebagian besar berasal dari masyarakat. Mereka dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mengatasi persoalan biaya dan pendanaan pendidikannya.

Sebagaimana dilaporkan DBE USAID di atas, bahwa BOS dari pemerintah hanya dapat memenuhi 36% dari total kebutuhan pendidikan. Sedangkan 64% lainnya pihak sekolah dan masyarakatlah yang dituntut untuk memenuhinya. Sementara itu dari segi kuantitas, jenjang SMP/MTs dan SMA/MA Swasta, jumlah lebih banyak dari pada Negeri. Dalam konteks inilah sebenarnya nasib penduduk Indonesia dalam hal akses pendidikan yang bermutu dipertaruhkan pada Sekolah/Madrasah Swasta.

Dari sekian banyaknya jumlah sekolah/madrasah swasta di Indonesia, tidak banyak yang dapat memberikan pendidikan yang bermutu sekaligus dapat diakses oleh seluruh lapisan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan *preliminary research* yang dilakukan peneliti, Sekolah Juara dan Sekolah SMART Ekselensia merupakan dua bentuk sekolah swasta Islam yang mulai menunjukkan eksistensinya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang berciri khas Islam, yang akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah.

Sekolah Juara merupakan sekolah unggulan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Sekolah yang berada dalam binaan Rumah Zakat dan berpusat di kota Bandung ini, memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yaitu antara lain Medan, Pekanbaru, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Cimahi, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Di kota-kota tersebut Sekolah Juara baru fokus pada jenjang SD, sedangkan Sekolah Juara Bandung sebagai kantor pusat berjenjang pendidikan SD dan SMP. Sekolah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu dan tidak dipungut bayaran sedikitpun. Walaupun siswa-siswinya tidak dipungut bayaran, Sekolah Juara memberikan pendidikan bermutu dengan guru-guru yang ahli di bidangnya, kurikulum yang terpadu dengan pendidikan agama Islam serta berorientasi pada *life Skill* (*Company Profile Sekolah Juara, 2010*).

Adapun Sekolah SMART Ekselensia merupakan sekolah akselerasi bebas biaya tingkat SMP-SMA. Berbeda dari Sekolah Juara, sekolah ini

merupakan sekolah unggulan (khusus laki-laki) yang siswanya merupakan hasil seleksi ketat dari seluruh Indonesia. Pendidikan sekolah menengah yang biasanya ditempuh selama 6 tahun, diselesaikan hanya dalam 5 tahun. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dengan prestasi akademik yang cemerlang namun memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, selama menempuh pendidikan di Sekolah SMART anak-anak tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun. Sekolah ini berada di bawah naungan Lembaga Pengembangan Insani (LPI) Dompot Dhuafa bertempat di Jampang, Bogor (Profil LPI, 2010. Lihat juga <http://dinaauliyahusni.blogspot.com/2010/02/smart-ekselensia-indonesia>).

Sekolah yang berdiri tahun 2004 ini kini sudah bersertifikat internasional dan terakreditasi 'A'. Berbagai prestasi mulai tingkat daerah, nasional, dan multinasional telah diraih. Semua alumninya kini melanjutkan di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Sistem pendidikan di SMART Ekselensia memiliki ciri khusus yakni penerapan kegiatan terpadu antara sistem pendidikan di sekolah dan pendidikan di asrama. Sistem pendidikan di sekolah terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, sedangkan di asrama meliputi program pengembangan diri. Selain prestasi akademisnya yang terus digenjut, Sekolah SMART memberi pendidikan agama, seperti bahasa Arab, *tahfidzul Qur'an*, dan lain-lain (Profil LPI, 2010. Lihat juga <http://dinaauliyahusni.blogspot.com/2010/02/smart-ekselensia-ndonesia.html>).

Hal menarik dari dua sekolah di atas adalah kemampuannya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu dengan biaya yang tidak murah. Hal menarik lainnya adalah bahwa di kedua sekolah tersebut siswa-siswanya tidak dipungut bayaran sedikitpun. Ini tentu memunculkan pertanyaan, bagaimana kedua sekolah tersebut memperoleh dana untuk membiayai kebutuhan pendidikan yang tidak sedikit itu. Di sinilah Rumah Zakat (RZ) dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa (LPI DD) berperan sangat banyak. Dua lembaga nirlaba tersebut merupakan lembaga *amil* (pengumpul dana zakat, infak, sedekah), yang dalam beberapa tahun terakhir mampu menggalang dana sosial yang luar biasa dari masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, bahkan dari pihak luar negeri. Sehingga, tidak heran jika seluruh siswa-siswinya dibebaskan sama sekali dari biaya pendidikan.

Terdapat kesamaan pada dua sekolah tersebut, yaitu kedua-duanya sama-sama di bawah binaan lembaga penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Jika Sekolah Juara dibina oleh Departemen Pendidikan Formal dalam Direktorat Program Senyum Juara di Rumah Zakat, maka Sekolah SMART Ekselensia dibina oleh Lembaga Pengembangan Insani yang merupakan salah satu jejaring Dompot Dhuafa Republika di bidang pendidikan. Belakangan kedua lembaga tersebut berhasil mampu menghimpun potensi dana umat untuk kemaslahatan kemanusiaan, yang salah satunya disalurkan untuk kepentingan pendidikan.

Sikap dermawan terhadap sesama atau yang dikenal dengan filantropi merupakan potensi umat yang sudah mengakar pada diri umat Islam. Filantropi atau yang dalam Islam dikenal dengan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), merupakan ajaran Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu. Melalui filantropi Islam ini, semestinya umat Islam bisa memanfaatkan untuk memberdayakan sumber daya manusia-nya (SDM) melalui berbagai jalur, di antaranya adalah jalur pendidikan.

Hasil penelitian Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan bahwa potensi dana umat dari sektor ZIS yang mungkin digali mencapai 19.3 triliun rupiah per tahun. Angka ini diperoleh dari rata-rata sumbangan keluarga Muslim per tahun sebesar 409.267 rupiah dalam bentuk tunai (*cash*) dan 148.200 rupiah dalam bentuk barang (*in kind*). Jika jumlah rata-rata sumbangan ini dikalikan dengan jumlah keluarga Muslim di Indonesia sebesar 34,5 juta (data BPS tahun 2000), maka total dana yang dapat dikumpulkan mencapai 14,2 triliun. Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesar 5,1 triliun rupiah (<http://www.interseksi.org/data/philanthropy.html>. Diakses tanggal 10 Agustus 2007).

Data tentang potensi filantropi Islam yang sangat besar tersebut di atas semestinya telah mampu meningkatkan kualitas SDM umat Islam. Namun pada tataran praktiknya, SDM umat Islam masih tergolong rendah, yang dibuktikan dengan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kesenjangan antara potensi dan kondisi umat Islam tersebut memunculkan

suatu dugaan bahwa potensi dana yang besar itu belum tergalai dan terkelola secara baik. Dengan kata lain, aspek manajemen dan akuntabilitas merupakan prioritas untuk dikembangkan

Salah satu instrumen strategis bagi peningkatan dan pengembangan SDM umat Islam adalah instrumen pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang jika dikelola dengan baik, akan menghasilkan lulusan dan keluaran yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja dan keilmuan. Untuk menghasilkan lulusan dan keluaran pendidikan yang handal, tentu perlu diawali dengan mutu proses pendidikan. Harus diakui, bahwa proses pendidikan bermutu membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Mengingat pentingnya posisi pendidikan tersebut, maka filantropi Islam menjadi suatu alternatif dalam membantu pendanaan proses peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan Islam.

Sebagai tindak lanjut dari pemanfaatan potensi filantropi Islam untuk pendidikan tersebut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Rumah Zakat dengan Sekolah Juaraanya dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa dengan Sekolah SMART Ekselensianya, berhasil menunjukkan bahwa penggalangan dana pendidikan melalui potensi filantropi Islam adalah sangat efektif dalam mencerdaskan bangsa, sebagai bentuk dari investasi SDM umat.

Bertolak dari alasan itulah, maka penelitian tentang Strategi Penggalangan Dana untuk Pendidikan (Studi Penggalangan Dana Zakat, Infak, Sedekah untuk Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Juara dan Sekolah SMART Ekselensia) menjadi sangat penting dilakukan.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Kemampuan memberikan pendidikan yang terjangkau dan bermutu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dan tidak banyak lembaga pendidikan yang mampu menggalang dana untuk kepentingan pendidikan yang bermutu. Sekolah Juara dan Sekolah SMART Ekselensia merupakan binaan dua lembaga pengumpul dana ZIS. Dari segi kelembagaan tersebut, dapat diketahui bahwa penggalangan dana pendidikan tersebut berbasis potensi dana ZIS umat Islam di Indonesia yang menurut beberapa penelitian luar biasa besarnya. Walaupun potensi umat Islam tersebut sangat besar, persoalan yang kerap kali dihadapi adalah kesadaran masyarakat untuk berderma, terutama jika dikaitkan dengan berderma untuk peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya manusia umat melalui pendidikan.

Melalui beberapa uraian di atas, fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana strategi penggalangan dana (*fundraising*) untuk pendidikan yang dilakukan lembaga *amil* untuk penyelenggaraan pendidikan formal dalam rangka berpartisipasi dalam program pemerataan mutu dan pemerataan akses pendidikan. Dengan kata lain, bahwa program pemerataan mutu dan pemerataan akses pendidikan nasional menuntut peran dan partisipasi sekolah swasta. Berhasil tidaknya program tersebut oleh sekolah swasta, salah satunya ditentukan oleh faktor ketersediaan dana.

Berdasarkan fokus permasalahan penelitian, dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa filosofi penggalangan dana untuk pendidikan di Rumah Zakat dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa?
2. Bagaimana program penggalangan dana untuk pendidikan di Rumah Zakat dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa?
3. Bagaimana pelaksanaan penggalangan dana untuk pendidikan di Rumah Zakat dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa?
4. Bagaimana dampak penggalangan dana untuk pendidikan di Rumah Zakat dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu?

C. Tujuan Penelitian

Produk akhir dari penelitian ini adalah ditemukannya model pengembangan strategi penggalangan dana untuk penyelenggaraan pendidikan formal, khususnya Sekolah Juara dan Sekolah SMART Ekselensia. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis:

1. Filosofi penggalangan dana untuk pendidikan di Rumah Zakat dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa.
2. Program penggalangan dana untuk pendidikan di Rumah Zakat dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa.
3. Pelaksanaan penggalangan dana untuk pendidikan di Rumah Zakat dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa.

4. Dampak penggalangan dana untuk pendidikan di Rumah Zakat dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Studi ini memberikan sumbangan konseptual utamanya kepada administrasi pendidikan, di samping itu juga kepada studi pembiayaan pendidikan. Sebagai sebuah studi pembiayaan pendidikan yang bersifat aplikatif, studi ini memberikan sumbangan substansial kepada lembaga pendidikan maupun para administrator, khususnya terkait dengan penggalangan dana untuk membiayai pendidikan.

1. Manfaat Teoretis

Secara umum, studi ini memberikan sumbangan kepada pengembangan teori-teori administrasi pendidikan, terutama pada penggalangan dan pemanfaatan dana pendidikan. Sudah saatnya lembaga-lembaga pendidikan bergerak dari pendanaan konvensional pendidikan menuju kepada pendanaan inkonvensional untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, baik dari segi investasi maupun operasional pendidikan.

Secara khusus, studi ini memberikan manfaat kepada pembiayaan pendidikan berupa konsep, model, dan aplikasi penggalangan dana ZIS, sebagai salah satu bentuk pendanaan inkonvensional, untuk mendanai pendidikan yang bermutu.

2. Manfaat Praktis

Pada tataran praktis, penelitian diharapkan dapat dijadikan media evaluasi diri bagi Rumah Zakat dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa untuk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Juara maupun SMART Ekselensia. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan model bagi penggalangan dana pendidikan di Sekolah/Madrasah di Indonesia, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang bermutu tinggi dan berdampak pada pencetakan keluaran yang berdaya saing tinggi.

E. Struktur Organisasi Penelitian

Sebagai bentuk dari laporan hasil penelitian, maka penelitian ini mengeksplorasi beberapa hal, yaitu: Bab pertama, menguraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian. Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang mendukung fokus penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran dan premis penelitian. Bab ketiga, mengeksplorasi tentang metode penelitian yang mencakup jenis, tempat, penelitian, penegasan istilah, metode pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Bab keempat, mengeksplorasi, menganalisis, dan membahas data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Bab kelima, berdasarkan temuan pada bab sebelumnya, bab ini selanjutnya membahas tentang pengembangan strategi penggalangan dana untuk pendidikan. Bab keenam, menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi penelitian.